

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KPUD TERHADAP VERIFIKASI CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI KABUPATEN  
PROBOLINGGO**

**(Studi di KPUD Kabupaten Probolinggo)**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD UNTUNG FARIZI  
NIM. 0910113032**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**Pelaksanaan Kewenangan KPUD Terhadap Verifikasi Calon Anggota Legislatif Dalam  
Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Probolinggo  
(Studi di KPUD Kabupaten Probolinggo)**

Muhammad Untung Farizi, Lutfi Efendi, SH, M, Hum., Herlin Wijayati, SH., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Oentoeng@rocketmail.com](mailto:Oentoeng@rocketmail.com)

**ABSTRAK**

Beberapa calon legislatif yang telah melanggar aturan verifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Verifikasi merupakan syarat utama agar bakal calon legislatif bisa terdaftar menjadi peserta pemilihan umum. Persyaratan bakal calon anggota legislatif ini harus dipatuhi oleh semua bakal caleg tanpa terkecuali. Beberapa calon legislatif ini telah lolos proses verifikasi dan telah menjadi calon tetap anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Probolinggo. Bagaimana proses verifikasi calon legislatif yang sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012? Upaya apa saja yang dilakukan Panwaslu dalam menangani masalah ini?. Artikel ini meneliti tentang pertanyaan-pertanyaan di atas melalui studi pelaksanaan pemilu di kabupaten Probolinggo. Untuk mendapatkan sumber data yang tepat dilakukan studi di KPUD kabupaten Probolinggo. Dengan demikian dapat diuraikan unsur-unsur yang dapat menjadi kunci dalam memberikan solusi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap verifikasi calon legislatif dalam pelaksanaan Pemilu.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kewenangan, Verifikasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo, Calon Anggota Legislatif, Pelaksanaan, Pemilu

**ABSTRACT**

*Some candidates who have violated the rules of verification that has been determined by law No. 8 of 2012 on the general election. Verification is a major requirement for legislative candidates can be a participant registered general election. Terms of legislative candidates must be obeyed by all prospective candidates without exception. Several candidates have passed the verification process and has been a permanent member of legislative candidates in 2014 in Probolinggo. How is the process of verifying candidates in accordance with Law No. 8 of 2012? What is being done Election Supervisory Committee in addressing this problem ?. This article examines the above questions through the study of elections in Probolinggo district. To get the right data sources Election Commission conducted a study in Probolinggo district. Thus it can be described elements can be key in providing legal solutions to violations of the verification of candidates in the election.*

*Keywords: Authority, Verification, Regional General Election Commission of Probolinggo district, Legislative Candidates, Implementation, Elections*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada PEMILU 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum.<sup>1</sup> Pemilihan umum untuk selanjutnya disebut pemilu yang diselenggarakan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini juga dicantumkan didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “pemilihan umum” untuk selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pemilu legislatif tahun 2014 menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses politik di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh Indonesia bahkan hampir semua negara menamakan dirinya sebagai negara yang demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Ditengah masyarakat, istilah PEMILU lebih sering merujuk kepada PEMILU legislatif dan PEMILU presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali. Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 pasal 18 ayat 3 menjelaskan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.<sup>2</sup> Sedangkan didalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>3</sup> Maka dengan demikian semua orang atau warga negara berhak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diatur didalam Undang-undang PEMILU.

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.

Saat ini pasca reformasi kran demokrasi telah dibuka selebar-lebarnya. Secara tersurat telah dijamin oleh konstitusi di Pasal 28E Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Akan tetapi implementasinya, dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan, prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut khususnya pada kebebasan untuk pendirian partai politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika sistem ketatanegaraan dan sistem politik yang berlaku.<sup>4</sup> Padahal fungsi partai politik di negara demokrasi yang sedang berkembang seperti di Indonesia salah satunya adalah sebagai sarana komunikasi politik, oleh karena itu partai politik mempunyai tempat yang luas dalam menempati kursi-kursi di pemerintah, baik itu di lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>5</sup>

Verifikasi partai politik dilakukan di seluruh provinsi, kabupaten dan atau kota seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten dan atau kota. Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum pasal 51 ayat 1 sudah dijelaskan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia 45

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia 45

<sup>4</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia, Setara press, malang, 2012, hal.2

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal.405-410

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus bersedia mengundurkan diri dari jabatannya dan akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik. Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk yang berwawasan kebangsaan, Partai Politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan Negara. Sekaligus sebagai sarana kaderisasi calon rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang resmi untuk menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum bertanggung jawab terhadap semua proses pelaksanaan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota, Kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>22</sup> ada beberapa calon legislatif yang lolos verifikasi akan tetapi sebenarnya belum memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) bisa dikatakan “kecolongan”. Seharusnya KPU lebih memperketat tahapan demi tahapan penyaringan terhadap bakal caleg yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan KPUD terhadap verifikasi calon anggota legislatif dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Probolinggo?
2. Mengapa KPUD melakukan penyimpangan dalam ketentuan umum pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam persyaratan bakal calon anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo?

## PEMBAHASAN

### Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan.<sup>6</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahannya yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup> Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan – kenyataan di lapangan.<sup>8</sup>

#### 3. Lokasi Penelitian

Alasan penulis dalam mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Probolinggo dikarenakan adanya isu hukum tentang beberapa calon legislatif yang menurut undang-undang tidak bisa lolos verifikasi tetapi dalam prakteknya beberapa calon legislatif ini lolos verifikasi. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis mengadakan penelitian lapangan. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Probolinggo dengan alasan telah ditemukannya kasus pada saat penyelenggaraan

<sup>6</sup> <http://content.ac.id/definisi/jenis-penelitian.html> di akses pada tanggal 18 Maret 2014

<sup>7</sup> Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta, 2007 hlm. 32

<sup>8</sup> Bambang, Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004

PEMILU. Beberapa oknum calon legislatif yang tidak menaati peraturan tentang pasal 51 Undang-undang No 8 tahun 2012. Hal ini bertentangan pula atau bertolak belakang dengan KPUD Kabupaten Probolinggo dikarenakan menetapkan orang-orang yang bersangkutan untuk tetap maju mencalonkan diri mereka dan tetap memberikan kelulusan verifikasi untuk maju ke tahap selanjutnya.

#### **4. Jenis Data**

##### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Probolinggo, dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang bagaimana pelaksanaan Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

##### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen – dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti

#### **5. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksud adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat sehingga tehnik yang digunakan yaitu :

##### **a. Wawancara ( Interview )**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.<sup>9</sup> Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab secara langsung yaitu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Probolinggo. Dengan metode wawancara secara bebas terpimpin yaitu

---

<sup>9</sup> <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> di akses pada tanggal 18 Maret 2016

dengan mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.<sup>10</sup>

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan – bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku – buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

c. Observasi

Mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang gejala permasalahan yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Pengamatan dilakukan terhadap obyek yang dituju yang dapat dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

## 6. Populasi dan Sampel

### Sampel

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.<sup>12</sup> Prosedur dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive area sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian. Dengan sumber yang ada dianggap dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Probolinggo

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori – teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

<sup>10</sup> Ronny, Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta 1990 hlm.107

<sup>11</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Reneka Cipta: Jakarta, 1997 hlm.67

<sup>12</sup> <http://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> di akses pada tanggal 18 Maret 2014



## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Gambaran Umum KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo**

Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Probolinggo beralamatkan di Jl. Raya Panglima Sudirman 440 Kraksaan-Probolinggo. KPU di Kabupaten Probolinggo berwenang untuk menyelenggarakan PEMILU yang berlangsung di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang-undang. KPU kota/Kabupaten adalah penyelenggara PEMILU di Kota/Kabupaten. Untuk melaksanakan tuntutan agenda reformasi Tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum (PEMILU). Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

## **2. Kewenangan KPUD Terhadap Verifikasi Calon Anggota Legislatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Probolinggo.**

Berkualitasnya PEMILU apabila dilihat dari sisi hasilnya berawal pada proses pencalonan, baik berkaitan dengan persyaratan, maupun mekanisme pencalonannya. Penentuan calon Legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari suatu proses di internal Partai Politik peserta Pemilu. Partai Politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk setiap daerah pemilihan. Walaupun undang-undang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun secara substansial, Partai Politik yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kualitas kadernya, untuk dapat dicalonkan sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, karena Partai Politiklah yang telah melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya dalam waktu yang cukup lama.

Untuk menghadapi hal tersebut, salah satu cara yang harus dilakukan KPUD Kabupaten Probolinggo adalah dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU yang bersih, efisien dan efektif. Kemudian meningkatkan kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan PEMILU serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Untuk melengkapi kelengkapan administrasi, KPU melakukan verifikasi mulai dari pengambilan formulir pencalonan dan sosialisasi kepada partai peserta pemilu, pengajuan bakal calon legislatif oleh partai politik sampai penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. didalam proses verifikasi berlangsung KPU membuat daftar calon sementara atau yang biasa disebut DCS yang kemudian dipublikasikan lewat media masa dan lewat baliho di 24 Kecamatan. Didalam melakukan verifikasi KPU bekerjasama dengan beberapa instansi yaitu diantaranya Kemendiknas dan Rumah sakit dengan tujuan untuk mengetahui keaslian ijazah dan kesehatan bakal calon legislatif.<sup>14</sup> Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan (meskipun

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 20014

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 20014

keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu) dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU. Jika ditinjau dari PEMILU yang harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan PEMILU harus mempunyai itikad untuk melaksanakan asas-asas tersebut. Pihak-pihak yang terkait adalah KPU, Bawaslu/Panwaslu sebagai pengawas PEMILU, caleg/partai politik sebagai peserta pemilu dan masyarakat selaku pemilih harus bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi.

Pengaturan tentang verifikasi partai politik dan calon legislatif mengandung paradoks. UU Pemilu mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon legislatif untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, salah satunya adalah harus menyertakan surat pengunduran diri jika berprofesi sebagai pegawai BUMN dan sebagai advokat/pengacara. Ketentuan yang diatur dalam pasal 51 UU No 8 Tahun 2012 ini merupakan acuan dasar dan utama untuk menentukan calon legislatif untuk menjadi peserta pemilu. Pasal ini pula-lah yang harus menjadi rujukan utama dan satu-satunya bagi KPU untuk membuat keputusan penetapan calon legislatif sebagai peserta pemilu. Terkait beberapa calon legislatif yang bermasalah, pihak KPU harus jeli terhadap hal itu. caleg yang tidak mampu melengkapi berkasnya atau memiliki berkas yang bermasalah tidak layak untuk diloloskan. Anggota legislatif bukan pekerjaan biasa. Mereka akan menuju parlemen atau menjadi pemimpin di ranah legislatif. Jikalau berkas saja tidak bisa dipenuhi padahal semua itu sudah diatur dalam undang-undang sehingga wajib untuk dipenuhi. KPU harus obyektif, jangan sampai meloloskan caleg yang berkasnya tidak lengkap. Jika ada salah seorang caleg yang tidak melengkapi administrasinya atau punya berkas yang dimodifikasi, KPU harus bertindak tegas. KPU bisa saja mencoret caleg tersebut karena memang tidak memenuhi syarat untuk diloloskan.

### **3. Alasan Ketidaksesuaian Dalam Ketentuan Umum Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Probolinggo**

Dalam penyelenggaraan PEMILU harus dapat dipastikan bahwa prinsip-prinsip PEMILU telah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, namun dalam tahapan penyelenggaraan PEMILU, memungkinkan terjadinya pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta pemilu maupun oleh pemilih itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran PEMILU, maka harus melewati mekanisme yang sudah diatur secara rinci yang diatur dalam pasal 249 s/d pasal 321 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang diawali dengan adanya laporan tertulis yang disampaikan oleh pemilih, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kota/Kabupaten paling lambat 7 hari setelah kejadian. UU Nomor 8 Tahun 2012 sudah lebih rinci mengatur dibandingkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008. Pelanggaran PEMILU yang dimaksud dapat berupa pelanggaran kode etik penyelenggaraan PEMILU, pelanggaran administrasi PEMILU, tindak pidana PEMILU, Sengketa PEMILU.

Dalam kegiatan PEMILU pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam pemilu. Dalam hal pelanggaran administrasi PEMILU, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa bakal calon legislatif di Kabupaten Probolinggo. Disebut pelanggaran dikarenakan bakal calon tersebut telah lolos proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU daerah Kabupaten Probolinggo. Profesi yang dijalani oleh beberapa calon legislatif ini adalah karyawan BUMN dan Advokat/Pengacara. Didalam pasal 51 ayat 1 dan 2 telah dijelaskan bahwa apabila seorang karyawan BUMN akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus menyertakan surat pengunduran diri dan apabila seorang Advokat/Pengacara akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus menyertakan surat untuk bersedia tidak praktek selama proses PEMILU berlangsung. Namun dalam prakteknya, kedua bakal calon legislatif ini tidak menyertakan kedua surat pernyataan tersebut dan masih bekerja didalam instansi mereka masing-masing yang kemudian dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU daerah Kabupaten Probolinggo.

Kecenderungan perilaku kedua calon legislatif ini sangatlah tidak dibenarkan karena tidak sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang PEMILU. Berdasarkan keterangan yang didapat, ada beberapa keterangan yang dapat menjelaskan alasan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa calon legislatif ini. Salah satu tantangan terbesar KPU dan seluruh

instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan PEMILU harus memperjelas aturan tentang bagaimana keikutsertaan karyawan BUMN meskipun sudah dijelaskan didalam pasal 51 UU nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan aspek yuridis seorang karyawan BUMN masih bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif tanpa menyertakan surat pengunduran diri dari profesinya karena didasarkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 25 P/HUM/2009.<sup>15</sup> Tetapi didalam kenyataannya sangat bertolakbelakang dengan putusan Mahkamah Agung No. 25 P/HUM/2009 karena permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon tersebut tidak dapat diterima. KPU Kabupaten Probolinggo seharusnya tidak menjadikan putusan MA tersebut sebagai dasar karena putusan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian pasal 51 ayat 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 2012 masih berlaku bagi siapa saja yang akan mendaftarkan menjadi calon legislatif tanpa terkecuali. Pengawasan yang menjadi faktor utama agar didalam menerapkan UU No. 8 Tahun 2012 bisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan pelaksanaannya. Kurangnya pengawasan pada saat proses verifikasi akan mengakibatkan lolosnya para bakal calon legislatif menjadi daftar calon tetap. Pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Panwaslu seharusnya benar-benar diperketat. Panwaslu sebagai instansi yang berhak melakukan pengawasan kepada KPU serta peserta PEMILU seharusnya memeriksa dokumen administrasi terlebih dahulu sehingga Panwaslu berperan aktif di dalam proses verifikasi.

Advokat / Pengacara yang dalam hal ini tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon legislatif karena sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Agar bisa menjadi calon legislatif dengan catatan harus menyerahkan surat untuk bersedia tidak berpraktek sebagai Advokat / Pengacara sampai PEMILU telah selesai. Pelanggaran administrasi yang dilakuan oleh calon legislatif dari seorang Advokat / Pengacara adalah tidak menyertakan surat untuk bersedia tidak berpraktek yang kemudian lolos verifikasi sehingga bisa menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) dan berhak mengikuti PEMILU tahun 2014.

Sering kali para bakal calon legislatif ketika mendaftar sebagai calon legislatif tidak memberikan daftar riwayat hidup yang sebenarnya termasuk juga seorang Advokat / Pengacara yang lolos verifikasi di Kabupaten Probolinggo yang kemudian KPU tidak bisa berbuat banyak

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 2014

untuk melakukan pengawasan terhadap “oknum-oknum” yang berbuat curang tersebut.<sup>16</sup> Dengan demikian KPU tidak bisa mengetahui profesi yang dijalani oleh bakal calon legislatif ini, yang berakibat lolosnya seorang Advokat / Pengacara didalam proses verifikasi yang dijalankan oleh KPU.

KPU daerah Kabupaten Probolinggo sebenarnya sudah memberikan surat kepada para pimpinan partai politik di Kabupaten Probolinggo dan melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon legislatif terkait “aturan main” untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif.<sup>17</sup> Masyarakat sebagai peserta PEMILU bisa juga mengawal proses verifikasi dengan cara jika ada indikasi pelanggaran yang terjadi pada saat diumumkannya DCS (daftar calon sementara). Masyarakat bisa melaporkan salah satu bakal calon legislatif yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan cara melaporkan kepada KPU secara tertulis beserta bukti yang dilampirkan. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pengawasan oleh masyarakat perlu sekali ditumbuhkembangkan, sehingga merupakan pengawasan yang efektif dan efisien.<sup>18</sup> Kemudian setelah terbukti melalui verifikasi data adanya kecurangan KPU melakukan rapat pleno yang hasilnya akan diserahkan kepada Panwaslu.<sup>19</sup> i masyarakat yang masuk.

Melalui Pasal 1 angka 23 Peraturan KPU No 7/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 13/2013, KPU menyatakan DCS hanya akan memuat nomor urut, nama, dan tanda gambar partai; dan nomor urut, pas foto, nama, jenis kelamin, dan alamat calon saja.<sup>20</sup> Padahal identitas lain calon anggota legislatif seperti usia, pekerjaan, dan pendidikan, misalnya, merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh publik guna memberikan masukan atau tanggapan terhadap pengumuman DCS (Daftar Calon Sementara). Keterangan usia tentu saja

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 20014

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 20014

<sup>18</sup> LAN RI, Sistem Adminstrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2004, Hal 189

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 20014

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 20014

penting diketahui publik untuk memastikan bahwa calon telah memenuhi persyaratan usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun. Keterangan pekerjaan diperlukan agar publik (masyarakat) bisa mengidentifikasi dan memastikan bahwa calon adalah seorang pejabat atau pekerja dari suatu profesi tertentu yang oleh UU diwajibkan untuk memenuhi persyaratan khusus. Panwaslu sebagai badan pengawas PEMILU di Kabupaten Probolinggo dalam hal ini juga berperan aktif untuk memberikan pengawasan dalam hal verifikasi. KPU sebagai penyelenggara PEMILU mengirimkan surat pemberitahuan memberikan jadwal verifikasi kepada Panwaslu untuk turut serta memberikan pengawasan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran.<sup>21</sup> Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg), yang mengagetkan terdapat beberapa calon anggota legislatif yang sama sekali tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi pencalonan menurut peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif bukan hanya persoalan mengisi formulir yang disiapkan oleh KPU dan membuat berbagai macam surat pernyataan dan keterangan. Tetapi terdapat tujuan yang ingin dicapai bahwa ketika rakyat memilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum, calon anggota legislatif yang tersedia di lembar surat suara telah merepresentasikan wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Mengingat output yang ingin dihasilkan adalah wakil rakyat yang memiliki karakter tersebut, maka undang-undang mempersyaratkan hal-hal yang mesti dipenuhi oleh para calon wakil rakyat tersebut. Disinilah tugas berat KPU membantu rakyat untuk menyeleksinya agar rakyat sebagai pengadil dalam pemilu tidak perlu lagi untuk bertanya apakah misalnya wakil rakyat yang dipilihnya memiliki pendidikan yang memadai, tidak pernah dipidana atau bahkan melanggar sumpah jabatan atas nama tuhan dan hal-hal ini mesti diperhatikan betul oleh KPU.

Calon legislatif masih memiliki waktu dan kesempatan yang cukup banyak untuk memperbaiki daftar calon dan persyaratan calon. Tetapi sebelumnya para calon legislatif juga memiliki waktu dan kesempatan yang sama, bahkan lebih panjang dari masa perbaikan untuk mempersiapkan dengan matang berbagai pemenuhan persyaratan tersebut dan kemampuan untuk mengikuti tata cara pengajuan bakal calon. Sehingga jika hasil verifikasinya seperti yang dikeluarkan oleh KPU, kita dapat menduga beberapa hal. Pertama, bahwa sebenarnya calon

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Probolinggo H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juni 20014

legislatif tidak pernah serius untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kedua, calon legislatif yang disediakan oleh beberapa partai politik memang bermasalah. Baik itu berupa permasalahan administratif, etik bahkan hukum.

## **KESIMPULAN**

- a) Pelaksanaan kewenangan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus sesuai dengan Undang-undang yang berkaitan dengan PEMILU. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan mengikat. Verifikasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo meliputi verifikasi administrasi yaitu berkenaan dengan persyaratan menjadi calon anggota legislatif secara administratif yang benar untuk menjadi peserta PEMILU untuk ikut serta dalam PEMILU tahun 2014.
- b) Alasan penyimpangan yang dilakukan KPUD dalam menerapkan ketentuan umum UU No. 8 Tahun 2012 dikarenakan kurangnya pengawasan yang menjadi faktor utama agar didalam menerapkan UU No. 8 Tahun 2012 bisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan pelaksanaannya. Kurangnya pengawasan pada saat proses verifikasi akan mengakibatkan lolosnya para bakal calon legislatif menjadi daftar calon tetap. Pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Panwaslu seharusnya benar-benar diperketat. Panwaslu sebagai instansi yang berhak melakukan pengawasan kepada KPU serta peserta PEMILU seharusnya memeriksa dokumen administrasi terlebih dahulu sehingga Panwaslu berperan aktif di dalam proses verifikasi. Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo sering mendapatkan kendala dikarenakan Sering kali para bakal calon legislatif ketika mendaftar sebagai calon legislatif tidak memberikan daftar riwayat hidup yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian KPU daerah Kabupaten Probolinggo kesulitan untuk melakukan verifikasi kepada bakal calon legislatif. Dengan adanya beberapa “oknum” nakal, KPU sebagai badan penyelenggara pemilu akan kesulitan untuk menyelenggarakan PEMILU yang bersih, jujur dan adil serta tidak ada pelanggaran.



## **SARAN**

### **1. Untuk masyarakat**

Dalam rangka pembangunan demokrasi dengan semangat reformasi, seorang calon legislatif yang akan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa dan negara harus menjalankan perannya dengan baik dan benar yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang, diawali dengan kejujuran pada diri sendiri agar terciptat PEMILU yang jujur, bersih adil dan tanpa pelanggaran.

### **2. Untuk KPUD Kabupaten Probolinggo**

Hendaknya pengawasan serta sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu harus diperketat sehingga ketidaksesuaian ketentuan dalam undang-undang dapat diminimalisir. Pelaksanaan dan penyelenggaraan verifikasi calon legislatif merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, sehingga pelaksanaan dan aturan teknis pelaksanaan verifikasi calon legislatif di hasilkan melalui keputusan KPU sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan Pemilihan Umum PEMILU dapat dijadikan kajian lebih lanjut. KPU sebagai badan penyelenggaraan PEMILU juga harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kecurangan bakal calon legislatif agar tidak terjadi pelanggaran terhadap verifikasi administrasi.

PEMILU bisa dikatakan berhasil apabila ada pihak-pihak yang berkepentingan mendukung dan mengawasi, disinilah peran pengawas pemilihan umum. Pengawas pemilihan umu (Bawaslu/Panwaslu) diharapkan lebih teliti dan waspada terhadap PEMILU terutama mengenai pelanggaran-pelanggaran pra, hari H maupun setelah pemilihan umum

### **3. Untuk Pemerintah**

Seharusnya Pemerintah berperan ikut aktif agar setiap proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Panwaslu/Bawaslu bisa benar benar dikawal agar tidak terjadi pelanggaran atau dengan kata lain ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pemerintah harus benar benar melakukan tindakan tegas kepada instansi yang berkaitan dengan PEMILU dan oknum yang terindikasi melakukan pelanggaran agar supaya PEMILU berjalan dengan bersih, jujur dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku:

- Abdul Mukhtie Fadjar, **Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia**, Setara press, malang, 2012.
- Bambang,Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada Jakarta,2004.
- Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Ronny,Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Gahlia Indonesia,Jakarta 1990.
- Soejono,Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Reneka Cipta:Jakarta,1997.
- Soerjono,Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press Jakarta,2007.

### Literatur Undang – Undang :

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

### Internet :

- <http://content.ac.id/definisi/jenis-penelitian.html><http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>
- <http://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>  
di akses pada tanggal 18 Maret 2014